

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini Indonesia sedang berfokus dalam peningkatan pembangunan dari segala aspek seperti, ekonomi, sosial, politik, hukum hingga sistem pendidikan dengan tujuan utama yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Langkah yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah dengan pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.<sup>1</sup> Yang disebut sebagai daerah otonom adalah sebuah kesatuan rakyat hukum yang memiliki batasan wilayah dan memiliki hak untuk menata serta mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah tersebut.<sup>2</sup> Berdasarkan definisi diatas, setiap pemerintah daerah memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan daerah kekuasaannya.

Pelaksanaan otonomi daerah sendiri merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan pembangunan di setiap daerah di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, setiap pemerintah daerah membutuhkan anggaran pengelolaan agar otonomi daerah dapat secara optimal dilaksanakan. Sumber pendapatan daerah terdiri dari 3 bagian yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh dari daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 6 Ayat 1 tentang Perimbangan Keuangan Negara Antara

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah* Pasal 1 ayat (6)

<sup>2</sup> *Ibid.*, ayat (12)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, memaparkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
4. lain-lain PAD yang sah.<sup>3</sup>

Pajak merupakan bentuk sumbangan wajib yang diberikan rakyat kepada suatu negara yang digunakan untuk kepentingan kepengurusan pemerintahan. Menurut lembaga pemungutannya sendiri, pajak dibedakan menjadi dua jenis yaitu, Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Dari beberapa jenis Pajak Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan sumber pendapatan yang cukup besar.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mendefinisikan pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.<sup>4</sup> Sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.<sup>5</sup>

Tujuan yang telah dicapai jika dibandingkan dengan target yang menjadi tujuan awal akan membentuk sebuah efektivitas, dalam penelitian ini yang diteliti ialah efektivitas dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Untuk memperkirakan tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi dengan target penerimaan pajak kendaraan bermotor. Sedangkan untuk memperkirakan tingkat efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat dilihat dari perbandingan

---

<sup>3</sup> Desi Purnama Sari, "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pajak Daerah di Kota Medan" (Medan: Skripsi, UMSU Medan, 2018), Hal.1

<sup>4</sup> Ibid., ayat (13)

<sup>5</sup> Ibid., ayat(14)

antara realisasi dengan target Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Semakin tinggi nilai realisasi penerimaannya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik nama memiliki nilai yang efektif.<sup>6</sup>

Banyak masyarakat yang memutuskan untuk memakai kendaraan pribadi dibandingkan naik kendaraan umum untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Tidak hanya itu, bahkan banyak pula masyarakat yang mempunyai lebih dari satu kendaraan bermotor. Apalagi didukung dengan mudahnya mendapatkan bantuan kredit dari dealer kendaraan untuk membeli kendaraan dengan cicilan. Maka dari itu, setiap tahun jumlah unit kendaraan bermotor yang ada di Indonesia akan semakin meningkat. Hal ini sudah seharusnya menambah kontribusi pajak kendaraan bermotor kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**Tabel 1.1**

**Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah UPT PPD Medan Selatan Tahun 2017-2020**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2017	227.240.324.435	249.529.041.306
2	2018	234.812.189.025	248.724.579.305
3	2019	236.320.205.528	245.101.394.350
4	2020	249.148.476.893	266.525.304.600

*Sumber : UPT PPD Medan Selatan*

Menurut riset database online Carmudi Indonesia, Sumatera Utara merupakan daerah yang memiliki pengguna mobil bekas tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2016, telah terjadi peningkatan sebanyak 600 unit mobil bekas pakai yang dijual di wilayah Sumatera Utara secara online pada Oktober 2016. Pada periode September-Oktober 2016 penjualan mobil bekas meningkat sekitar 59,79 %. Pada tahun 2016, Kota Medan memiliki 250 *showroom* mobil bekas dan 70%

<sup>6</sup> Clarissa Agnes Yuanita, Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Wilayah Surabaya Utara, (Surabaya: Skripsi, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, 2018).h.6

di antaranya berada di kawasan Jalan Nibung Raya.<sup>7</sup> Berdasarkan fenomena ini, bisa dipastikan bahwa antusiasme masyarakat Sumatera Utara terutama kota Medan terhadap mobil bekas terbilang cukup tinggi. Dengan tingginya minat beli kendaraan bekas seharusnya menambah kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor.

**Tabel 1.2**

**Jumlah Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020**

Tahun	Mobil Penumpang (unit)	Truck/Bus (unit)	Mobil (Unit)	Sepeda Motor (Unit)	Jumlah (Unit)
2018	26.697	734	13.740	322.191	363.362
2019	52.732	1.074	22.215	442.777	518.798
2020	62.296	1.690	24.755	463.305	552.046

*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara*

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama (BBN) menjadi sumber pendapatan yang cukup besar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT PPD) Medan Selatan, didukung dengan bertambahnya jumlah unit kendaraan bermotor setiap tahunnya di Provinsi Sumatera Utara. Badan Pusat Statistik Sumatera Utara memaparkan jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2018 sebanyak 363.362 unit. Kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 518.798 unit dan pada tahun 2020 semakin meningkat menjadi 552.046 unit. Ini menjadi bukti bahwa setiap tahunnya jumlah kendaraan bermotor di Sumatera Utara mengalami peningkatan.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> M.Bagus.R, “Pasar Mobil Bekas di Sumatera Utara Tumbuh Pesat”, <https://m.medcom.id>. Diunduh pada tanggal 16 Oktober 2021.

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, “Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Jenis Kendaraan (unit) 2018-2020.” diakses dari <https://www.bps.go.id/>

**Tabel 1.3**  
**Laporan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor**

Tahun	Target PKB	Pokok PKB	
	(Rp)	Kendaraan (unit)	Realisasi (Rp)
2018	220.357.036.445	238.414	235.088.787.147
2019	223.900.569.243	221.534	227.130.749.050
2020	231.619.850.037	224.630	249.689.681.069

*Sumber : UPT PPD Medan Selatan*

**Tabel 1.4**  
**Laporan Realisasi Bea Balik Nama Kedua Kendaraan Bermotor (BBN2-KB)**

Tahun	Target BBN2-KB	Pokok BBN2-KB	
	(Rp)	Kendaraan (unit)	Realisasi (Rp)
2017	6.365.460.164	9.940	6.343.979.385
2018	6.081.295.659	7.187	4.752.786.726
2019	4.272.075.948	10.234	6.243.373.311

*Sumber : UPT PPD Medan Selatan*

Data yang didapatkan oleh penulis dari UPT PPD Medan Selatan menunjukkan adanya fluktuasi pada realisasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kedua kendaraan bermotor (BBN2-KB). Pada tahun 2018, UPT PPD Medan Selatan berhasil merealisasikan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp.235.088.787.147, melampaui target yang ditentukan yaitu sebesar Rp.220.357.036.445. Akan tetapi, pada tahun 2019, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan menjadi Rp.227.130.749.050 dan melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp.223.900.569.243. Pada tahun 2020, kembali mengalami peningkatan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp.249.689.681.069 dan melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.231.619.850.037. Sementara pada sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua (BBN2-KB) pada tahun 2017, UPT PPD Medan Selatan Berhasil merealisasikan penerimaan BBN2-KB sebesar Rp. 6.343.979.385 dengan target

sebesar Rp.6.365.460.164. Namun pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi Rp4.752.786.726 dengan target sebesar Rp.6.081.295.659 dan tahun 2019 mengalami peningkatan kembali menjadi Rp. 6.243.373.311 dengan target sebesar Rp.4.272.075.948. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa adanya fluktuasi atau naik turunnya Target dan Realisasi sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di UPT PPD Medan Selatan. Salah satu penyebabnya ialah kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk membayar pajak, dibuktikan dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor tetapi tidak sejalan dengan jumlah penerimaan yang didapatkan dari realisasi Pajak Kendaraan Bermotor maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang masalah ini, itulah alasan penulis ingin melakukan penelitian yang meneliti efektivitas dan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dengan mengangkat judul :

“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di UPT PPD Medan Selatan Tahun 2016-2020”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berikut adalah identifikasi masalah yang diuraikan pada latar belakang di atas:

1. Sektor pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama mendapatkan penerimaan yang cukup besar dari sektor pajak daerah lain yang terdapat di UPT PPD Medan Selatan sehingga seharusnya kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga besar,
2. Terdapat fluktuasi pada target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di UPT PPD Medan Selatan
3. Tingginya minat masyarakat membeli kendaraan bekas di Sumatera Utara.

4. Jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya di Sumatera Utara meningkat tetapi tidak sejalan dengan peningkatan target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama di UPT PPD Medan Selatan.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, peneliti membatasi objek penelitian hanya pada Sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kedua Kendaraan Bermotor (BBN2-KB) serta Pendapatan Asli Daerah di UPT PPD Medan Selatan

### **D. Rumusan Masalah**

Beberapa masalah yang akan menjadi fokus penelitian berdasarkan latar belakang masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPT PPD Medan Selatan pada tahun 2016-2020?
2. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor di UPT PPD Medan Selatan pada tahun 2016-2020?
3. Bagaimana tingkat kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di UPT PPD Medan Selatan pada tahun 2016-2020?
4. Bagaimana tingkat kontribusi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di UPT PPD Medan Selatan pada tahun 2016-2020?
5. Apa saja kendala yang dihadapi dalam mencapai target penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di UPT PPD Medan Selatan?
6. Apa saja upaya yang dilakukan oleh UPT Samsat Medan Selatan untuk mencapai target penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di UPT PPD Medan Selatan?



## **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPT PPD Medan Selatan.
- b. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor di UPT PPD Medan Selatan
- c. Untuk mengetahui tingkat kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di UPT PPD Medan Selatan.
- d. Untuk mengetahui tingkat kontribusi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di UPT PPD Medan Selatan.
- e. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam mencapai target penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di UPT PPD Medan Selatan.
- f. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mencapai target penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di UPT PPD Medan Selatan.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah :

- a. Bagi Penulis  
Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan pengetahuan dan pengalaman penulis terkait sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta untuk meningkatkan kemampuan analisis dan berfikir melalui penulisan skripsi ini.
- b. Bagi Instansi Terkait



Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan perbandingan bagi penelitian yang akan dikembangkan oleh peneliti-peneliti lainnya.

